

## ***Eksistensi Nilai Lokal dalam Inovasi Pemerintah Daerah - Program Brigade Siaga Bencana (BSB) di Kabupaten Bantaeng***

**Ahmad Nitozi Mansur**

**Ahmad Taufik**

**St. Nurmaeta**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin No.259, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

[nitoziahmad@gmail.com](mailto:nitoziahmad@gmail.com)

*Received: September 24, 2019; Revised: April 06, 2020*

*Accepted: April 06, 2020*

### **ABSTRACT**

*This article aims to describe the innovation of Bantaeng Local Government in the Disaster Preparedness Brigade program (BSB) and investigating the existence of local wisdom values on the program. The informants in this research included the Head of Innovation and Development Subdivision of the Regional Development Planning Board, the Head of Culture Division of the Education and Culture Office, Doctors assigned by the Health Office to the program, Traditional leaders and people who have benefited from the program. The data analysis includes data reduction, data display and conclusion drawing. The techniques of data collection used were in-depth interviews, direct observation, literature review and documentation. The results of this research indicate: (1) that integrated services of the BSB innovation program in Bantaeng Regency equalize health services between those who live in urban areas and in remote villages, (2) Decentralization (3) Cooperation involving three government agencies and foreign parties, (4) Involvement of community members, and (5) Use of information and communication technology. Furthermore, the local values existing on the local government innovation in the BSB program in Bantaeng Regency include (1) Honesty, (2) Obedience, (3) Intellectual Value and (4) Tenacity.*

**Key Words:** *innovation; local wisdom values; disaster preparedness brigade program*

### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang inovasi pemerintah daerah dalam program Brigade Siaga Bencana (BSB) serta mengetahui eksistensi nilai lokal pada inovasi pemerintah dalam program BSB tersebut. Informan dalam artikel ini ialah Kasubag Inovasi dan Pengembangan Bappeda, Kabag Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dokter yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan pada program BSB, Pemangku adat, serta masyarakat yang pernah merasakan manfaat dari program BSB tersebut. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi langsung, kajian pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan: (1) Bahwa layanan terintegrasi program inovasi Brigade Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng menyetarakan pelayanan kesehatan antara yang tinggal di perkotaan dan di pelosok Desa, (2) Desentralisasi (3) Pemanfaatan kerjasama yang melibatkan tiga instansi pemerintah serta pihak asing, (4) Pelibatan anggota masyarakat, dan (5) Pemanfaatan Teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian, eksistensi nilai-

nilai lokal pada inovasi pemerintah daerah dalam program inovasi Brigade Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng terlaksana berdasarkan nilai yang ditemukan, yaitu: (1) Nilai Kejujuran, (2) Nilai Kepatutan, (3) Nilai Cendekia dan (4) Nilai Keteguhan.

**Kata Kunci :** inovasi; nilai lokal; program brigade siaga bencana

## **1. PENDAHULUAN**

Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur Pemerintahan daerah sendiri . Hal ini memicu munculnya inovasi di beberapa daerah. Pemerintah pusat mengadakan kompetisi dalam hal inovasi daerah yang diberi nama "*Innovative Government Awards (IGA)*". Dengan demikian kompetisi yang diadakan oleh KEMENDAGRI ini akan semakin memacu dan menjadi support eksternal dari pemerintah daerah dalam berinovasi agar dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya sehingga menambah daya saing bagi daerah tersebut. (Rahmawati, dkk, 2014).

Sedermayanti dalam Marom (2015:54) menyatakan bahwa inovasi meliputi penciptaan sesuatu yang tidak ada saat ini dan dapat berupa penciptaan kecil atau sesuatu yang monumental. Secara khusus inovasi di dalam lembaga publik bisa didefinisikan sebagai penerapan (upaya membawa) ide-ide baru dalam implementasi, dicirikan oleh adanya perubahan langkah yang cukup besar, berlangsung cukup lama dan berskala cukup umum sehingga dalam proses implementasinya berdampak cukup besar terhadap perubahan organisasi dan tata hubungan organisasi (Salahuddin. dkk, 2017:7).

Strategi inovasi dalam pemerintahan menurut Sangkala (dalam M. Tahir dan Harakan, 2015:284), yaitu: (a) Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan yang tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan. (b) Desentralisasi pemberian dan monitoring layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis. (c) Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antara publik dan swasta. (d) Pelibatan warga Negara. Kewenangan pemerintah yang inovatif harus merealisasikan peran-peran pentingnya dengan mendorong peran warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan. (e) Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Inovasi sendiri telah ada landasan hukumnya dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga pasal 390 UU 23/2014. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk pembaharuan antara lain penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Begitu pun dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pasal 1, yaitu pemerintah daerah dengan kewenangannya sebagai pemimpin melaksanakan otonomi daerah untuk mengidentifikasi, mendata, menjaga, memberdayakan, dan mempublikasikan kearifan lokal atau nilai nilai lokal untuk mengetahui dan menjaga eksistensinya.

Moendardjito (dalam Hendar, 2012) mengatakan kearifan lokal adalah kecerdasan yang bersifat lokalitas yaitu mampu bertahan dari pengaruh budaya

luar. Artinya pergeseakan budaya yang masuk dari luar disebabkan oleh salah satu dampak globalisasi mampu teranulir sehingga efek yang disebabkan budaya luar tidak menggeser posisi lokalitas itu sendiri didukung oleh kesadaran masyarakat terhadap pentingnya identitas suatu daerah (*local genius*). Tak hanya itu, transformasi nilai budaya juga harus dilakukan agar nilai nilai budaya mampu beradaptasi dengan konteks kekinian saat ini dan tidak ketinggalan zaman (Yunus dalam M. Tahir, 2017).

Rahim (dalam Idris, 2015:241) menjelaskan bahwa menurut Toriolo, yang menentukan manusia, berfungsi dan keterlibatan sifat manusia, sehingga manusia menjadi manusia (nilai budaya Bugis-Makassar). Nilai budaya disebut sebagai nilai inti yang harus melakukan perannya dalam kegiatan, keduanya di antaranya individu dan lembaga kemasyarakatan adalah: 1. Lempu' = Jujur (Honesty, Credibility) dalam bahasa Indonesia artinya jujur, sama dengan lurus sebagai lawan dari bengkok. Dalam berbagai konteks kata ini berarti ikhlas, benar, baik atau adil. Sehingga lawan katanya adalah culas, curang, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu, aniaya, dan semacamnya. Arti ini dapat dipahami ketika ditemukan kata lempu' dalam ungkapan-ungkapan Bugis atau Lontara. Berbagai cara pula lontara menerangkan kejujuran itu. Ketika Tociung, cendekiawan Luwu, diminta nasihatnya oleh calon raja (Datu) Soppeng, La Manussa' Toakkarangeng, beliau menyatakan ada empat perbuatan jujur, yaitu (a) memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya; (b) dipercaya lalu tak curang, artinya disandari lalu tak berdusta; (c) tak menyerakahi yang bukan haknya; (d) dan tidak memandang kebaikan kalau hanya buat dirinya, baginya baru dinamakan kebaikan jika dinikmati bersama

2. Asitinajang = Kepatutan (Proper) dalam bahasa Indonesia artinya Kepatutan, kepantasan, kelayakan, kata ini berasal dari tinaja yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Lontara mengatakan : "Duduki kedudukanmu, tempati tempatmu. Ade' wari' (adat pembedaan) pada hakikatnya mengatur agar segala sesuatu berada pada tempatnya. Mengambil sesuatu dari tempatnya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, termasuk perbuatan mappasitinaja. Nilai kepatutan ini erat hubungannya dengan nilai kemampuan (makamaka) jasmaniah dan ruhaniah. Penyerahan atau penerimaan sesuatu, apakah itu amanat atau tugas, haruslah didasarkan atas kepatutan dan kemampuan. Makamaka lebih banyak menekankan penampilan bagi pemangku tanggung jawab.

3. Reso Acca = Kepandaian (Proficiency, Intellectual) Acca : dalam bahasa Indonesia berarti kepandaian atau kepintaran dapat dipahami, baik dalam arti positif maupun negatif. Padahal acca bukan pandai atau pintar tetapi cendekia atau intelek, (cendekia dari Sangsekerta, kearifan dari bahasa Arab). Lontara juga menggunakan kata nawa-nawa yang berarti sama dengan acca. Jadi orang mempunyai nilai acca atau nawanawa oleh lontara disebut Toacca, Tokenawanawa atau Pannawanawa, yang dapat diterjemahkan menjadi cendekiawan, intelektual, ahli pikir atau ahli hikmah arif. Pengertian ini masih perlu dijelaskan guna membantu kita memahami nilai kecendekiaan yang dikemukakan oleh lontara. Tociung menyebutkan bahwa cendekiawan (toakenawanawa) mencintai perbuatan dan kata yang benar, waktu menghadapi kesulitan dia memikirkannya kembali, dan berhati-hati melaksanakan segala sesuatu.

4. Getteng= Keteguhan (Firm) dalam bahasa Indonesia artinya teguh, kata inipun berarti tetap-asas atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. Sama halnya dengan nilai kejujuran, nilai kecendekiaan dan nilai kepatutan, nilai keteguhan ini terikat pada makna yang positif. Ini dinyatakan oleh To Ciung Maccae ri Luwu bahwa empat perbuatan nilai keteguhan (a) Tak mengingkari janji, (b) tak mengkhianati kesepakatan, (c) tak membatalkan keputusan, tak mengubah kesepakatan, dan (d) jika berbicara dan berbuat, tak berhenti sebelum rampung. Dalam perjanjian persahabatan negara-negara Bugis-Makassar yang masih tetap diakui bersama, antara lain ditetapkan : "bahwa barangsiapa yang lebih dahulu menemukan suatu jalan yang lebih baik, maka berjanjilah siapa-siapa yang menemukan kebajikan itu lebih dahulu supaya memberitahukannya kepada raja-raja lainnya. Perjanjian inilah yang menjadi dasar penerimaan Raja Bone dan raja-raja Bugis lainnya. Akan tetapi setelah beliau mengumumkan keislamannya ternyata rakyat Bone menolak seruan beliau. Ini terjadi pada waktu baru saja tiga bulan beliau bertakhta. Atas penolakan ini, beliau melepaskan kedudukannya, lalu pergi ke Pattiro, di negeri mana beliau dahulu sebagai Arung yang memerintah (Arung Pattiro). Rakyat di sini pun menolak dakhwah Islamiah yang disampaikan beliau, kemudian beliau berangkat ke Tallo, Gowa; dan dari sini beliau ke Bantaeng untuk berdiam disitu. Di sinilah beliau mangkat, sehingga beliau disebut Matinroe ri Bantaeng.

Menurut Putra (2014), dalam penelitiannya yang berjudul "Demokrasi Tomanurung Falsafah Politik Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan". Berkenaan dengan nilai politik Tomanurung, nilai-nilai budaya di sini dimaknai sebagai pandangan, pendapat atau keyakinan yang menjadi alat untuk menentukan baik-buruknya, benar-tidaknya siasat, aktivitas, sistem, dan struktur yang menyangkut kehidupan orang banyak. Disisi lain, dua tahun setelahnya Nurhaq (2016) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Inovasi Layanan Kesehatan Bebas Retribusi di Kabupaten Bantaeng". Hasil penelitiannya BSB (Brigade Siaga Bencana) merupakan sebuah layanan kesehatan dengan sistem mobile dan sistem jemput bola pasien dengan menghubungi call center 119 atau telepon (0413-21408) beroperasi selama 24 jam secara gratis.

Secara umum faktor yang mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaannya ialah unsur masukan meliputi tenaga medis, dana dan sarana yang tersedia sesuai kebutuhan, lalu unsur lingkungan meliputi kebijakan, organisasi dan manajemen, dan unsur proses meliputi tindakan medis dan tindakan non medis sesuai standar profesi yang telah ditetapkan. Setahun berikutnya Al Gazali (2017) melakukan penelitian yang berjudul "*Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kabupaten Bantaeng*" dan hasilnya ialah pembangunan Rumah Sakit di Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu wujud pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah secara berkesinambungan untuk terciptanya hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan pembangunan fisik di Kabupaten Bantaeng sebagai bagian dari inovasi pemerintah daerah di Kabupaten Bantaeng.

Adapun tujuan artikel ini untuk mengetahui gambaran inovasi program Brigade Siaga Bencana, serta mengetahui eksistensi nilai lokal dalam program BSB yang merupakan inovasi berbasis pelayanan publik di bidang kesehatan yang ada di Kabupaten Bantaeng.

## 2. METODE

Penelitian untuk artikel ini direncanakan dan dilakukan kurang lebih selama 2 Bulan di 3 instansi di Bantaeng, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pertimbangan lokasi penelitian di daerah tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang bersifat objektif dan menyeluruh serta mendalam.

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, studi dokumen, pengamatan lapangan. Data primer yang berasal dari sampel informan untuk wawancara mendalam ditetapkan dengan metode *purposive sampling*, yaitu orang-orang yang dianggap memang mengetahui secara persis terkait dengan gambaran program inovasi BSB serta eksistensi nilai lokal dalam program tersebut.

Informan dalam penelitian ini ialah Kasubag Inovasi dan Pengembangan Bappeda, Kabag Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dokter yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan pada program BSB, Pemangku adat, serta masyarakat yang pernah merasakan manfaat dari program BSB tersebut. Sementara data sekunder yang dikaji dan dianalisis berupa kajian pustaka tentang BSB yang berjudul : *“Napak Tilas The New Bantaeng dalam Bingkai Brigade Siaga Bencana”*.

Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi langsung, kajian pustaka dan dokumentasi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini ada beberapa indikator untuk mengetahui gambaran program BSB dan eksistensi nilai lokal dalam program tersebut. Untuk melihat gambaran program BSB adapun indikatornya, layanan terintegrasi, desentralisasi, pemanfaatan kerjasama, pelibatan warga Negara, serta teknologi komunikasi dan informasi sebagai tolak ukur gambaran BSB ini beroperasi. Dan adapun nilai lokal yang ingin diketahui eksistensinya dalam program BSB, yaitu nilai kejujuran nilai cendekia, nilai keteguhan, dan nilai kepatutan.

Pada tahun 2008, status dan derajat kesehatan di Kabupaten Bantaeng masih rendah. Beberapa indikator antara lain, angka kematian ibu (AKI) angka kematian Bayi (AKB). angka kasus gizi buruk. dan lain-lain, sehingga program inovasi kemudian hadir di Kabupaten Bantaeng. Seperti beberapa kasus-kasus yang telah di jelaskan di atas ternyata selain kelompok yang miskin, perempuan juga sangat rentan terhadap masalah kesehatan. Dan masih sangat banyak lagi persoalan-persoalan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat secara umumnya apalagi yang berada di daerah terpencil dan mempunyai akses yang sangat sulit untuk ditempuh, hal ini menunjukkan bahwa selain kesehatan dan kemiskinan ada hal lain yang sangat krusial untuk di perhatikan yaitu mengenai akses.

Tepat pada tahun 2009, akses menjadi hal fokus pemerintah pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat sangat perlu diperhatikan, selain karena adanya beberapa masalah yang ditunjukkan di atas, ternyata ada masalah yang sangat urgen, yakni akses untuk melaksanakan program Brigade Siaga Bencana atau (BSB).

Berdasarkan PERDA Kabupaten Bantaeng No. 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng BSB hadir sebagai program inovasi peningkatan angka kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Pelayanan kesehatan terhadap kelompok tersebut sulit terlaksana karena berbagai faktor yang menjadi penghambat. Faktor paling dominan ialah kondisi geografis dan topografis wilayah, sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sangat minim. Bagi Kecamatan dengan aksesibilitas rendah, jarak dan waktu tempuh menuju sarana kesehatan terdekat mencapai 60 sampai 90 menit. Sementara untuk kasus berat yang memerlukan penanganan bersifat spesialisik waktu tempuh terjauh wilayah Kabupaten Bantaeng dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah 45 menit.

Beberapa program dalam inovasi Brigade Siaga Bencana (BSB) tidak lain adalah peningkatan layanan kesehatan melalui program yang ada seperti penanggulangan kemiskinan dan kelaparan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat kelas ekonomi ke bawah, mengurangi kematian balita dan resiko ibu melahirkan serta mengandung, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu program kebersihan baik di rumah maupun di sekitar. Hal ini dilakukan untuk memastikan air minum yang layak demi kesehatan lingkungan dan hal-hal lainnya.

Selain itu, faktor ekonomi dan sosial budaya mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menentukan pelayanan kesehatan. Kondisi ini menyebabkan kasus resiko tinggi Ibu melahirkan yang membutuhkan penanganan segera juga mengalami keterlambatan. Hal ini diperburuk dengan kondisi lingkungan tinggal dengan faktor resiko rawan penyakit seperti daerah kumuh dan tertinggal, rawan banjir, dan sanitasi kesehatan yang tidak memadai. Seperti kasus kesehatan yang disebabkan yakni infeksi dan berbasis lingkungan seperti tuberculosis, demam berdarah dengue (DBD), serta diare sangat mudah ditemui.

Kehadiran dari program inovasi BSB ini dimulai sejak awal kepemimpinan bupati Nurdin Abdullah, tetapi pada awal pengoperasiannya seluruh masyarakat Bantaeng masih belum mengetahui kehadiran dari BSB. Dengan hadirnya BSB, mempermudah akses kesehatan seluruh lapisan masyarakat Bantaeng mulai dari yang tinggal di wilayah perkotaan hingga di wilayah terpencil Kabupaten Bantaeng. Hanya dengan menghubungi call center di 119 tim BSB akan langsung menuju lokasi yang membutuhkan pertolongan terkait kesehatan ditambah dengan keunggulannya, pasien yang dalam kondisi gawat darurat, dokter dapat melakukan tindakan medis langsung di BSB mobile. Namun salah satu kendala dalam BSB yaitu teknologi komunikasi. Jika komunikasi pada wilayah yang membutuhkan BSB terganggu, informasi terkait masyarakat yang membutuhkan pertolongan kesehatan tidak tersampaikan dengan cepat.

Langkah kunci yang harus disepakati adalah komitmen dan integritas dari para *stake holder* pemberi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilakukan BSB berdasarkan visi yaitu mewujudkan Bantaeng sehat, mandiri, berkualitas pada Tahun 2015. Visi ini dilaksanakan melalui misi yaitu: Pemerataan dan peningkatan kualitas dan mutu pelayanan Brigade Siaga Bencana (1) Meningkatkan mutu, sarana dan prasarana, pelayanan Brigade siaga Bencana (2) Meningkatkan sistem informasi kesehatan (3) Pemerataan dan perluasan jangkauan.

Dalam proses pengusulan dan perumusan program inovasi Brigade Siaga Bencana (BSB) ini, pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak luput melibatkan tokoh masyarakat seperti, pemangku adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, dan orang-orang yang paham terkait nilai-nilai lokal itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar proses kerja dan standar prosedur dalam cara kerja BSB tidak meninggalkan adat-adat, budaya dan nilai yang dianut dalam sistem bermasyarakat di Kabupaten Bantaeng.

Hasilnya, program BSB ini hadir tidak hanya sebagai usulan dari kacamata pemerintah melihat rendahnya angka kesehatan, tetapi juga berdasar dari masukan-masukan masyarakat sebagai bentuk aspirasi dan harapannya kepada pemerintah dalam pemberian pelayanan dan kenyamanan namun bersesuaian dengan adat istiadat dari nilai lokal yang di anut masyarakat Bantaeng.

Inovasi program BSB tidak disusun oleh instansi pemerintah saja, tapi melibatkan pula masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat yang dianggap berpengaruh lainnya. Pembentukan BSB ini tidak serta merta langsung ada begitu saja, tetapi melalui proses sosialisasi, pengenalan terhadap masyarakat, pelibatan, dan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyebarannya. Adapun masyarakat yang terlibat langsung diajarkan bagaimana pencegahan tumbuhnya bibit penyakit serta penanganan beberapa penyakit seperti diare, penyakit menular, dan penyakit penyakit lain yang tumbuh bebas di tengah tengah masyarakat. Adapun pendidikan sejak dini tentang pentingnya kesehatan oleh BSB yang di adakan di rana sekolah formal, lingkungan pemerintah, lingkungan masyarakat serta pada perangkat Pemerintahan. Hal ini dilakukan sebagai sarana aspirasi pemerintah agar diketahui masalah yang dihadapi dan tindakan apa yang harus dilakukan.

Nilai-nilai positif dari nilai lokal yang menjadi bagian dari perumusan BSB ini dapat ditemui dalam proses kerjanya di lapangan. Nilai nilai lokal tersebut secara tersirat menjadi sebuah Standar Operasional (SOP) Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam aturan operasi BSB di lapangan.

Masyarakat dan tokoh masyarakat diundang oleh pihak BAPPEDA untuk membicarakan terkait nilai lokal yang dimasukkan ke dalam program inovasi BSB sebagai nilai nilai yang harus dijaga dan dilestarikan. Respon masyarakat sangat menerima dengan baik terkait hadirnya program ini, walaupun progres dari program BSB memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk beradaptasi di masyarakat seperti saat sekarang ini. Program BSB mengandung banyak nilai positif di masyarakat, seperti pada saat dibutuhkannya masyarakat hanya perlu menelepon di *call center* 119 tidak perlu lagi membawanya ke PUSKESMAS. Dimana keunggulan dari BSB itu sendiri memiliki peralatan yang lengkap dengan tersedianya perawat dan dokter yang selalu bersiaga jika ada yang membutuhkan jasa BSB, berbeda dengan PUSKESMAS dengan peralatan yang masih seadanya dan minimnya tenaga medis yang menangani pasien. Selain tokoh masyarakat, perangkat Desa, Dusun, dan yang lainnya yang lebih paham, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum paham. Di tambah teknologi untuk menyebarkan informasi dan persepsi masyarakat bahwa hadirnya BSB mobile adalah sebuah layanan kesehatan dengan gratis retribusi yang naungi langsung oleh PEMDA Kabupaten Bantaeng dan juga mobil BSB itu

adalah hasil dari bantuan Jepang kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai investasi peningkatan pelayanan kesehatan. Terkhusus di Masyarakat adat Onto masih ada beberapa warga bertahan dengan metode obat tradisional sekalipun penyakit yang dialami membutuhkan perawatan medis. Adapun nilai lokal yang terkandung di dalam inovasi BSB itu sendiri contohnya ialah *sipakatau* atau memanusiaikan manusia dalam proses beroperasinya. Adapun nilai nilai yang lain seperti nilai kerjasama antara tim yang bertugas dalam BSB maupun antara masyarakat dengan program itu sendiri. Dan juga dalam proses perencanaan program inovasi BSB seluruh pihak masyarakat termasuk pemangku adat masyarakat adat Onto dalam hal ini KH menerima program BSB dengan baik dan hanya orang orang yang belum paham yang tidak menerima program tersebut sepenuhnya.

Terlaksananya program Brigade Siaga Bencana ini tidak berlangsung tersosialisasikan begitu saja menyeluruh kepada masyarakat, hal ini terjadi karena proses sosialisasi tidak langsung dari rumah ke rumah sehingga masih ada beberapa kalangan masyarakat yang belum mengetahui kehadiran program ini. Namun seiring berjalannya waktu proses sosialisasi tidak hanya melalui program program pencerahan ataupun dari pemerintah secara formal melainkan dari pelaksanaan program ini, masyarakat akan paham karena bicara dari mulut ke mulut warga serta keluarga ataupun tetangga yang berada di sekitar pasien yang ditangani oleh pegawai Brigade Siaga Bencana, selain itu juga masyarakat sangat mengharapkan kehadiran program ini dapat terlaksana dan bertahan sekalipun Pemimpin Daerah terganti, selain itu masyarakat juga mengharapkan program ini berkembang seperti pengaktifan postu dan puskesmas baik desa ataupun kecamatan aktif dan ada petugas seperti Dokter ataupun perawat yang siaga 24 Jam agar akses kesehatan lebih mudah terjangkau.

Adapun layanan dalam program BSB ini sangat memadai sebagaimana yang tertuang UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bertajuk Inovasi Daerah dimana peningkatan kualitas pelayanan dan peralatan yang ada harus mampu menunjang kebutuhan masyarakat atas kualitas pelayanan yang memadai . Program ini ditunjang oleh ketersediaan alat yang lengkap dan tim medis yang selalu siaga layaknya di Rumah Sakit umum, jika sewaktu waktu ada masyarakat yang menghubungi di *call centre* 119 dan juga jika pasien sangat membutuhkan perawatan, tidak ada proses administrasi yang memakan waktu cukup lama untuk menindaklanjuti kondisi pasien yang membutuhkan perawatan secepat mungkin.

Jadi, layanan terintegrasi terkait program inovasi BSB jika melihat pelayanan publik yang diberikan program ini mewakili harapan masyarakat yang tidak sederhana dan kenyamanan yang diterima oleh masyarakat terpenuhi dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan Buku "*Napak Tilas The New Bantaeng dalam Bingkai Brigade Siaga Bencana (BSB)*" sebagai referensi peneliti dan temuan peneliti yang ada di lapangan, kehadiran BSB sebagai strategi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan serta permintaan layanan kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi sekalipun itu d daerah terpencil, pemerintah menempatkan 5 posko utama Brigade Siaga Bencana yang tersebar di 5 wilayah di Kabupaten Bantaeng. Adapun 5 wilayah tersebut ialah di Kecamatan Bissappu untuk menangani wilayah Bantaeng Barat hingga di perbatasan Kabupaten Jeneponto,



Kecamatan Ulu Ere menangani di wilayah Bantaeng Utara hingga berbatasan pada wilayah pegunungan Kabupaten Jeneponto, di wilayah Kecamatan Bantaeng atau pusat Kota Kabupaten Bantaeng, menangani wilayah perkotaan hingga pinggiran Kota Bantaeng, di Kecamatan Pa'jukukang menangani wilayah Bantaeng Timur hingga di perbatasan Kabupaten Bulukumba, dan di Kecamatan Tompo Bulu menangani wilayah bagian pegunungan Bantaeng hingga di wilayah yang berbatasan dengan pegunungan Kabupaten Bulukumba.

Program BSB ini tidak hanya memenuhi permintaan masyarakat Bantaeng saja, melainkan juga dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantaeng, seperti di Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto dan di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bertajuk Inovasi Daerah efisiensi dan efektifitas pelayanan bersesuaian dengan monitoring langsung yang dilakukan oleh pemerintah terkait pemenuhan permintaan masyarakat Bantaeng dengan hadirnya 5 posko utama Brigade Siaga Bencana yang ada untuk membentuk kepastian terkait permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat Kabupaten Bantaeng. Tidak hanya itu, kepuasan yang diterima masyarakat yang tinggal di perbatasan Kabupaten Bantaeng juga merasakan manfaat di bidang kesehatan dari program BSB ini.

Bupati Bantaeng bekerja sama dengan beberapa instansi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Dinas yang berkordinasi dan bergerak di bidang pendidikan seperti sekolah melalui program penanganan sejak dini dan pelestarian nilai lokal sebagai bagian perumusan dari program BSB, Dinas Badan Pembangunan Daerah sebagai perencanaan dan pengembangan inovasi BSB menjadi inovasi yang telah diterapkan di Kabupaten Bantaeng dan masih berlangsung hingga sampai saat ini, dan Dinas Kesehatan sebagai kordinasi pelaksana dan aktor dari program BSB.

Tidak hanya itu, aparat yang berwenang juga terlibat mengambil peran dalam berjalannya program inovasi BSB ini sebagai pengamanan perjalanan ketika BSB sedang beroperasi di jalan. Bantuan langsung dari kerjasama pengusaha Jepang dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Bantaeng diberikan berupa mobil yang digunakan BSB untuk beroperasi.

Tidak hanya *stake holder* dan investasi asing yang terlibat dalam perencanaan program BSB, tetapi tokoh masyarakat maupun pemangku masyarakat adat ikut berperan dalam prosesnya. Respon masyarakat sangat menerima dengan baik terkait hadirnya program ini, walaupun progres dari program BSB memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk beradaptasi di masyarakat seperti saat sekarang ini.

Program BSB mengandung banyak nilai positif di masyarakat, seperti pada saat dibutuhkannya masyarakat hanya perlu menelepon di *call center* 119 tidak perlu lagi membawanya ke PUSKESMAS. Dimana keunggulan dari BSB itu sendiri memiliki peralatan yang lengkap dengan tersedianya perawat dan dokter yang selalu bersiaga jika ada yang membutuhkan jasa BSB, berbeda dengan PUSKESMAS dengan peralatan yang masih seadanya dan minimnya tenaga medis yang menangani pasien. Selain tokoh masyarakat, perangkat Desa,

Dusun, dan yang lainnya yang lebih paham, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum paham.

Pada proses pengenalan program BSB, masyarakat diberikan berupa buku yang berjudul “Napak Tilas *The New Bantaeng* dalam Bingkai Brigade Siaga Bencana (BSB)” oleh instansi Bappeda sebagai bahan bacaan untuk mensosialisasikan program BSB ini kepada masyarakat.

Demikian pula untuk menjamin kelangsungan pelayanan dibentuk jaringan informasi dan komunikasi antara PUSKESMAS dan jejaringnya dengan pihak BSB sehingga dapat terbentuk sistem pelayanan untuk mendapatkan informasi tentang program pemerintah, maka dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang program BSB dan cara menghubungi BSB *call center* di 119.

Teknologi komunikasi dan informasi menjadi hal yang penting dalam program BSB ini, karena tim BSB yang akan beroperasi harus mengetahui informasi tentang keluhan pasien, kondisi pasien, lokasi pasien untuk mempersiapkan semua keperluan yang dibutuhkan dalam perawatan yang dilakukan kepada pasien.

Nilai kejujuran dalam proses perumusan program BSB menjadi hal utama, karena program ini bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Di mana konsep pelayanan kesehatan tentang saling tolong menolong (*sipakatau*) manusia, memberikan kemudahan, dan akses untuk menikmati pelayanan kesehatan yang sama walaupun berada di daerah yang terpencil. Dengan hadirnya program ini, sebagai bentuk dari bagian harga diri (*siri*) pemerintah dalam memberikan pelayanan dan kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan.

Nilai kejujuran yang menjadi hal yang penting dalam proses pelaksanaan program BSB ini di lapangan dan lebih menguatkan pada pelibatan warga Negara dan pemanfaatan kerjasama. Dimana pada kerjasama antara dinas dan instansi pemerintah serta pemberian kendaraan BBSB oleh investasi asing, dan juga keterlibatan masyarakat dalam perumusan BSB ini, dibutuhkan kejujuran sehingga tercipta komitmen dalam peningkatan pelayanan di bidang kesehatan Kabupaten Bantaeng. Program dalam pelaksanaannya di lapangan ini harus melaporkan kepada markas utama sebagai laporan telah melakukan tugas dan tindakan perawatan ataupun penanganannya kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Masyarakat dalam penanganannya harus jujur pula jika tidak, bisa saja terjadi kesalahan tindakan yang akan dilakukan oleh tim BSB kepada pasien.

Penanganan yang cepat dan tepat dapat diberikan oleh tim BSB kepada masyarakat jika segala informasi yang diterima disampaikan sejujur-jujurnya, sehingga pelayanan lebih terintegrasi dan kenyamanan yang diinginkan masyarakat terpenuhi. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan perawatan kesehatan, seseorang dapat melakukan tindakan yang tepat dengan menghubungi pihak BSB di *call center* 119, agar penanganan terkait kesehatan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh tim BSB. Tokoh masyarakat ataupun tokoh agama juga ikut andil dalam memberikan sosialisasi tentang kebenaran adanya sarana program BSB ini kepada masyarakat awam terkait informasi itu.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam program BSB ini menempatkan tenaga kesehatan terampil dan yang lebih berpengalaman untuk melakukan tugasnya sebagai pelaksana program BSB. Dokter yang bertugas pada program BSB memaparkan, sarana ambulance

keliling yang representatif didukung dengan pengemudi yang sudah berlisensi dan berpengalaman agar segala sesuatu dalam pengoperasian program ini, bisa terlaksana dengan sangat hati-hati (aman).

Masyarakat melakukan tindakan yang tepat dengan menghubungi BSB ketika masyarakat yang lainnya sesegera mungkin membutuhkan penanganan medis. Pemerintah juga menempatkan orang yang tepat di bidangnya agar segala sesuatu dalam pelaksanaan program BSB ini tidak terjadi kesalahan dan selalu bertindak dengan hati-hati.

Program BSB adalah program yang sangat layak untuk dijalankan di bidang inovasi pelayanan kesehatan, sebab dengan adanya program ini, masyarakat yang kurang mampu bisa menikmati pelayanan yang sama dengan masyarakat yang mampu karena program BSB ini tergolong gratis atau bebas retribusi. Dengan hadirnya program ini, pemerintah mampu menurunkan angka kematian anak hingga 2/3 dalam kurun waktu 1990-2015, meningkatkan kesehatan ibu dalam rana masyarakat tidak mampu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit yang menular lainnya.

Sarana pelayanan mobile yang mencakup seluruh wilayah yang ada di Bantaeng, menyiapkan sarana pelayanan kesehatan di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten untuk mengantisipasi kondisi yang mengharuskan rujukan langsung ataupun rujukan tidak langsung. Program BSB ini memberikan pula pelatihan kepada masyarakat melalui *Medical First Responder* (MRF) dalam meningkatkan respon awal penanganan kasus pasien gawat darurat.

Program BSB sudah bisa dikategorikan layak dengan peningkatan layanan kesehatan yang dimaksimalkan pada layanan terintegrasi dan kerja sama sebagaimana dengan adanya sarana pelayanan mobile, sarana pelayanan kesehatan di tiap tingkatan desa, kecamatan hingga kabupaten, dan edukasi kepada masyarakat tentang penanganan awal pasien yang gawat darurat. Pemberian pelatihan-pelatihan khusus kepada tim medis BSB seperti dokter, bidan, dan perawat diberikan untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam menangani kasus pasien gawat darurat. Tak hanya itu, masyarakat umum juga diberikan pelatihan untuk penanganan awal terkait kasus pasien kecelakaan lalu lintas. Demikian pula untuk menjamin kelangsungan pelayanan dibentuk jaringan informasi dan komunikasi antara PUSKESMAS dan jejaringnya dengan pihak BSB sehingga dapat terbentuk sistem pelayanan yang berkelanjutan sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bertajuk Inovasi Daerah yang menjelaskan tentang meningkatkan efisiensi dan berorientasi kepada kepentingan umum, serta Undang Undang No. 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan tentang nilai keteguhan dimana menjadi sebuah kelayakan dalam tidak mengingkari komitmen yang telah dibuat.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng betul-betul memperhatikan kinerja program tersebut dilapangan. Dengan menghadirkan SOP yang jelas, pelatihan khusus terkait tim medis, dan pelatihan penanganan gawat darurat kepada masyarakat ditambah hadirnya pula jaringan informasi *bottom up* dan *top down* pada sektor pelayanan kesehatan sehingga dapat terbentuk sistem pelayanan yang berkelanjutan.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang eksistensi nilai lokal dalam inovasi pemerintah daerah di Kabupaten Bantaeng, peneliti menjabarkan bahwa

gambaran inovasi pemerintah daerah dalam program inovasi Brigade Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada: (1) Bahwa layanan terintegrasi program inovasi Brigade Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng menyetarakan pelayanan kesehatan antara yang tinggal di perkotaan dan di pelosok Desa, (2) Desentralisasi (3) Pemanfaatan kerjasama yang melibatkan tiga instansi pemerintah serta pihak asing, (4) Pelibatan anggota masyarakat, dan (5) Pemanfaatan Teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian, eksistensi nilai-nilai lokal pada inovasi pemerintah daerah dalam program inovasi Brigade Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng terlaksana berdasarkan nilai yang ditemukan, yaitu: Nilai Kejujuran, Nilai Kepatutan, Nilai Cendekia dan Nilai Keteguhan.

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan uraian rekomendasi saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan juga instansi terkait dalam inovasi program Brigade Siaga Bencana (BSB) perlu mempertahankan dan menguatkan unsur nilai-nilai lokal yang sudah menjadi standar perumusan program BSB. Jangan biarkan nilai-nilai lokal tersebut tergerus hingga menjadikan suatu daerah kehilangan identitas daerahnya.

2. Diharapkan pemerintah Kabupaten Bantaeng dan instansi yang terkait dalam program BSB ini, meningkatkan koordinasi yang lebih baik lagi dengan layanan kesehatan di tingkat Desa, Kecamatan, hingga di Kabupaten untuk memperoleh layanan yang lebih maksimal dan juga memberikan sosialisasi terkait hadirnya program inovasi BSB tersebut agar masyarakat awam lebih paham dan memanfaatkan pelayanan tersebut guna terjadi peningkatan perubahan ke arah yang lebih baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Gazali, A. 2017. "Skripsi Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kabupaten Bantaeng".
- Hendar, J. H. 2012. "Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Kepemimpinan Sunda. Prosiding Konvensi Nasional Pendidikan IPS". (Konaspipi) ke 1. FPIPS-UPI Bandung..
- Idris, M. 2015 "Bureaucracy Ethics Based in Public Service Local Wisdom in Gowa. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol. 6 No. 6 S4 Desember.
- Marom, Afarul. 2015. Jurnal "Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik Bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Kudus". ISSN 2460-9714 Vol. 1, No. 1, Oktober.
- Nurhaq, M. 2016. Skripsi "Analisis Inovasi Layanan Bebas Retribusi di Kabupaten Bantaeng".
- Pemerintah Kabupaten Bantaeng: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2017. "Napak Tilas The New Bantaeng dalam Bingkai Brigade Siaga Bencana (BSB). Bantaeng: PEMDA Bantaeng
- Putra, H. S. A. 2014. "Jurnal Demokrasi To-Manurung Falsafah Politik Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan". Vol. 40 (1) Juni.
- Rahmawati, T., Noor, I., Wanusmawatie, I. 2014 "Jurnal Sinergitas Stakeholder dalam Inovasi Daerah". JAP Vol. 2, No. 4.
- Salahuddin, Amruddin, Z., Azizah, E. C. 2017. "Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Studi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)". di akses pada 20 Juni 2018.

- Tahir, M. M dan Harakan A. 2015. "*Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Smart Card di Kota Makassar*". Jurnal Conference: Prosiding Seminar Nasional Call For Paper "Refleksi Pencapaian Reformasi Birokrasi di Indonesia", At Bandung, Volume: 1 di akses pada 18 Juni 2018.
- Tahir, M. M. dan Harakan, A. 2017 "*Inovasi Program Kesehatan 24 Jam Dalam Mewujudkan Good Health Care Governance di Kabupaten Bantaeng*" Jurnal Vol. 2, No. 1, Desember.

Peraturan Undang-undang :

PERDA Kabupaten Bantaeng No. 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, Tentang Pemajuan Kebudayaan.

UU No. 23 Tahun 2014 dari Pasal 386 hingga pasal 390 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Bertajuk Inovasi Daerah.